

RI Bisa Tangkis Gugatan UE Soal Nikel

Tanggal : Senin , 18 Januari 2021
Media : Media Indonesia
Halaman : 11
Wartawan : M Ilham Ramadhan Avisena
Muatan Berita : Netral
Narasumber : Yose Rizal Damuri (*Kepala Departemen Ekonomi CSIS*), Muhammad Lutfi (*Menteri Perdagangan*)
Rubrik : Sektor Riil
Topik : Nikel

RI Bisa Tangkis Gugatan UE soal Nikel

Untuk memenangi sengketa gugatan Uni Eropa atas larangan ekspor nikel, Indonesia harus mampu membuktikan prinsip-prinsip di dalam WTO.

M ILHAM RAMADHAN AVISENA
ilh@mediaindonesia.com

INDONESIA memiliki peluang menang dan kalah yang sama dalam menghadapi gugatan Uni Eropa terhadap pembatasan ekspor nikel. Hal itu disebabkan aturan dalam World Trade Organization (WTO) tentang pembatasan ekspor masih abu-abu.

"Sebenarnya kalau di dalam WTO itu *prohibition* dan *restriction* secara umum dilarang. Tapi sebenarnya banyak sekali yang melakukan. Jadi, Indonesia bukan satu-satunya yang melakukan. Tapi kalau untuk ekspor ini, memang masih abu-abu. Jadi, secara legal, itu masih banyak yang perlu dijelaskan," tutur Kepala Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri saat dihubungi, kemarin.

Yose mengatakan, meski kebijakan pelarangan ekspor secara umum dilarang WTO, larangan itu tidak mendetail dan gamang. Dus, kebijakan yang dibuat Indonesia masih mungkin diterima WTO.

Pemerintah RI menetapkan larangan ekspor bijih nikel per 1 Januari 2020, atau dua tahun lebih cepat daripada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 yang memperbolehkan ekspor komoditas tambang tersebut hingga 2022.

UE menggugat larangan itu ke WTO dan meminta pembentukan panel WTO pada 14 Januari 2021 untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Menurut Yose, untuk memenangi sengketa

itu, Indonesia harus mampu membuktikan prinsip-prinsip yang ada di dalam WTO. Misalnya, implementasi kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel itu tidak bersifat diskriminatif dan Indonesia transparan dalam melakukan kebijakannya.

Di lain sisi, peluang untuk kalah dari sengketa itu juga terbuka lantaran secara garis besar kebijakan pelarangan ekspor tidak dikehendaki dalam WTO. Bilapun Indonesia kalah, kata Yose, masih ada peluang mengajukan banding.

Terus perjuangkan

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan pemerintah Indonesia menyelesaikan langkah UE yang meminta pembentukan panel WTO tersebut. Mendag menegaskan pemerintah akan terus memperjuangkan kepentingan Indonesia di tingkat multilateral. Salah satunya ialah mempertahankan kebijakan Indonesia terkait dengan bahan mentah (DS 592) yang tengah digugat UE di WTO.

"Indonesia siap mempertahankan posisinya di forum penyelesaian sengketa di WTO. Pemerintah bersama pihak terkait akan terus berkoordinasi untuk memastikan bahwa langkah dan upaya mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing nasional akan senantiasa menjadi agenda prioritas ke depan," kata Mendag Lutfi lewat keterangan resmi di Jakarta, Jumat (15/1).

Dalam menyikapi langkah UE tersebut, pemerintah Indonesia berpandangan Uni Eropa telah salah memahami dan mengartikan kebijakan Indonesia meskipun hal tersebut telah disampaikan secara jelas saat proses konsultasi pada 2020.

Indonesia merupakan penghasil besi baja kedua terbesar di dunia setelah Tiongkok. Pada Januari-November 2020, sektor besi baja merupakan penyumbang ekspor terbesar ke-3 setelah minyak kelapa sawit dan batu bara dengan nilai US\$9,6 miliar. (1m/Ant/E-3)